

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/...../KEP/35.07.013/2019
TENTANG
PEENGESAHAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RANCANGAN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda mulai dilakukan setelah surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 2 Januari 2019 Nomor : 005/001/35.07.202/2019 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, kemudian Bagian Administrasi Perekonomian Setda membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Sebelum dilakukan asistensi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Bagian Administrasi Perekonomian melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2020 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 2 Februari 2019 Nomor : 050/1466/35.07.202/2019 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2020, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai hasil verifikasi. Rancangan Renja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sedangkan Pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan

selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

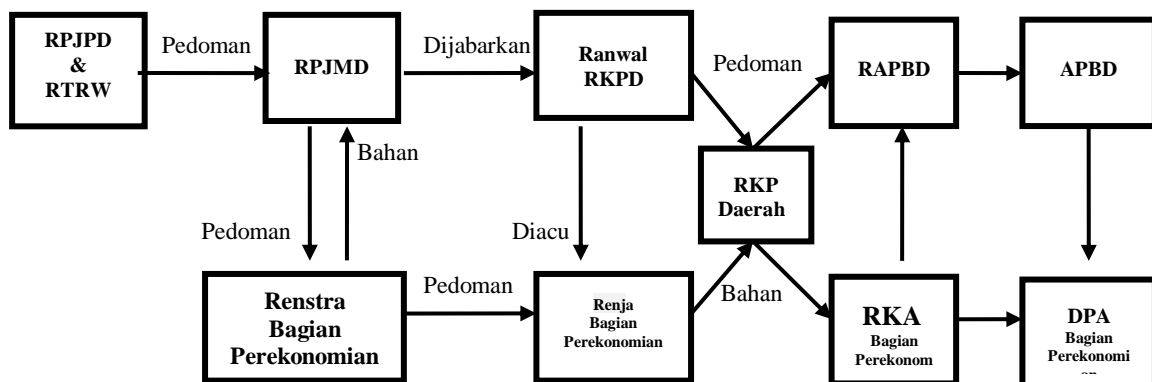
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian Setda menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah,

perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda 2020 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020, Sedangkan tujuannya penyusunan rencana kerja ini adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Setda;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda;

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian Setda Tahun 2019 dan Capaian Rencana
Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi
Perekonomian
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian
Administrasi Perekonomian Setda
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SETDA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian Setda
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SETDA

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Pada Tahun 2019 Bagian Administrasi melaksanakan 6 program dan 23 kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian kinerja/ program kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019 dapat tercapai 100%. Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki Program Prioritas yaitu Program Administrasi bidang Perekonomian. Dari target dan realisasi masing-masing sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa tercapai 100% sehingga dapat dikatakan berhasil.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Perekonomian meliputi :

1. Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro Kreatif,
2. Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan,
3. Serta Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD.

Pelaporan tersebut masing masing terdiri dari 2 laporan semester 1 dan 2, dengan jumlah pelaporan 6 laporan untuk pelaporan evaluasi kinerja BUMD pada triwulan 1 merupakan evaluasi atas kinerja BUMD pada tahun sebelumnya, dan triwulan 3 adalah evaluasi atas kinerja BUMD pada semester 1 tahun berjalan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda dan pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

11
Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2019
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s.d 2021(akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2019 (Tahun Berjalan)		Keteran gan
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
	Urusan: Perencanaan										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100%	91 %	91 %	100%	100 %	100 %	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	600 buah	150 surat	15 surat	4 surat	27 %	15 buah	15 buah	15 buah	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak	360 orang	6 orang	17 OB	17 OB	100	14 OB	14 OB	14 OB	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan dan sarana kebersihan kantor	60 OB	2 ruangan	12 OB	12 OB	100	12 OB	12	12 OB*	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor	60 Jenis	12 bulan	42 Jenis	42 Jenis	100	42 Jenis	42	42 Jenis*	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	12 bulan	7 Jenis	7 Jenis	100	7 jenis	7	7 jenis*	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik	6 jenis	12 bulan	8 Jenis	8 Jenis	100	6 jenis	6	6 jenis*	

7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	3 sub bag	2 Jenis	2 Jenis	100	2 jenis		2 jenis*	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	911 HOK	176 HOK	132 HOK	132 HOK	75	176 HOK		176 HOK*	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah	850 HOK	150 perjalanan	41 HOK	9 HOK	21	41 HOK		200 HOK*	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi	967 HOK	300 perjalanan	167 HOK	142 HOK	100	142 HOK		200 HOK*	
11	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	234 HOK	234 HOK	234 HOK	192 HOK	82	234 HOK		234 HOK*	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100%	88,90%	89,90%	100%	100%	100	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	2 ruangan	4 jenis	4 jenis	100	1 jenis		1 jenis*	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	2 ruangan	2 jenis	2 jenis	100	3 jenis		3 jenis*	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 & 2 yang dipelihara rutin/ berkala	28 unit	6 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit		4 unit	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	3 jenis	3 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis		2 jenis	

5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/pelihara	3 jenis	17 unit	12 jenis	11 jenis	92	4 jenis		4 jenis	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait	-	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	77 stel	16 personil	13 stel	13 stel	100	14 stel	14 stel	14 stel*	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah penyediaan pakaian dinas	77 stel	-	-	-	-	14 stel	14 stel	14 stel*	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	96,71%	96,71%	100%	100%	100%	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	94 orang	17 orang	17 orang	12 orang	96,71	16 orang		16 orang*	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	5 Buku	1 laporan	-	-	-	-		-	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	10 Buku	2 laporan	-	-	-	-		-*	
I	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase jumlah pelaporan Keikutsertaan dalam pameran berskala lokal	-	50%	-	-	-	-	-	-	

1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan pelaksanaan, perencanaan, koordinasi & pengembangan usaha kecil menengah	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan hasil evaluasi dan monitoring pelaku usaha kecil dan mikro	2 laporan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
II	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase promosi potensi ekonomi daerah	-	50%	-	-	-	-	-	-	-
1	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	1 data potensi	1 data potensi	-	-	-	-	-	-	-
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	1 Laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
III	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	50%	-	-	-	-	-	-	-
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	2 Laporan	33 kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
IV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	50%	-	-	-	-	-	-	-
1	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 laporan	12 kali	-	-	-	-	-	-	-
V	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	Prosentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	50%	-	-	-	-	-	-	-
1	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah pelaporan capaian info ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1 laporan	1 kali	-	-	-	-	-	-	-
VI	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase pelaporan pendistribusian Raskin	-	50%	-	-	-	-	-	-	-

1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	12 kali	-	-	-	-	-	-	
VII	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai	8 laporan	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
VIII	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaporan Monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	8 laporan	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan*	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan Monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan	8 laporan	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan*	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	8 laporan	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan*	

Keterangan tabel 2.1

**) Tidak dapat di akumulasikan karena adanya perbedaan baik nama target kinerjanya maupun volume/ besar kinerjanya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah di tahun 2019 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang perekonomian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	tepat waktu dan akuntabel											
19.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	
20.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
6.	Persentase jumlah pelaporan kikutsertaan dalam pameran berskala lokal			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
21.	Jumlah pelaporan pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	Merupakan kegiatan baru sebagai akibat terbentuknya sub- bagian koperasi dan UKM
22.	Jumlah pelaporan/evaluasi fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	
7.	Persentase promosi potensi ekonomi daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
23.	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	-	-	1 data potensi	-	-	-	1 data potensi	-	-	-	
24.	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
8.	Persentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
25.	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	
9.	Persentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
26.	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	6 laporan	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-
10.	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	perundang-undangan di bidang cukai											
27.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
11.	Persentase materi yang disampaikan dalam rangka peningkatan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
29.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
13.	Prosentase Pelaporan pendistribusian Raskin			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
30.	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	-	
14.	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
31.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
15.	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian	-	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
32.	Pelaporan monitoring Koperasi dan Usaha Mikro				2 laporan	2 laporan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
33.	Pelaporan monitoring Perindustrian dan Perdagangan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	Pelaporan monitoring Pemanfaatan Sarana Perekonomian & BUMD				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau stakeholder terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan stakeholder terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi” pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan

berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dengan hasil bahwa beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, dan serta Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian antara lain monitoring koperasi dan usaha mikro, monitoring perindustrian dan perdagangan serta monitoring pemanfaatan saran perekonomian dan BUMD.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

24
Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

1	Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05	Fungsi Penunjang urusan Fungsi Lainnya									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	100%	155.868.000	PAD		100%	252.912.614	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	Kab. Malang	120 buah	5.800.000	PAD		120 buah	1.054.152	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honorarium dalam satu tahun	Kab. Malang	72 OB	39.739.000	PAD		72 OB	65.604.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Malang	12 OB	4.531.000	PAD		12 OB	5.830.000	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Malang	60 jenis	14.401.000	PAD		60 jenis	26.152.486	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kab. Malang	6 jenis	2.774.000	PAD		6 jenis	3.221.020	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Kab. Malang	6 jenis	1.782.000	PAD		6 jenis	3.235.661	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Kab. Malang	2 jenis	1.741.000	PAD		2 jenis	3.162.456	
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab. Malang	192 HOK	3.882.000	PAD		192 HOK	5.234.158	

1	Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	Kab. Malang	200 HOK	48.884.000	PAD		200 HOK	80.700.950	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	Kab. Malang	200 HOK	32.334.000	PAD		200 hok	58.717.731	
	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah bahan Logistic kantor yang dibeli	Kab. Malang	243 HOK	4.400.000			243 HOK	4.480.000	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik	Kab. Malang	100%	36.727.000	PAD		100%	60.553.361	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	4.184.000	PAD		3 jenis	7.598.679	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang tersedia	Kab. Malang	5 jenis	15.209.000	PAD		5 jenis	25.107.500	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	6 unit	10.803.000	PAD		6 unit	19.618.940	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor	Kab. Malang	3 jenis	4.184.000	PAD		3 jenis	7.598.679	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	2.190.000	PAD		3 jenis	5.065.786	

1	Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	Kab. Malang	100%	14.400.000	PAD		100%	14.400.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	5.815.000	PAD		16 setel	9.600.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	5.908.000	PAD		16 setel	4.800.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	Kab. Malang	100%	85.866.000	PAD		100%	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	Kab. Malang	16 orang	85.866.000	PAD		16 orang	15.000.000	Mendukung program Responsif gender
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kab. Malang	100%	14.498.000	PAD		100%	9.267.753	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	Kab. Malang	1 buku	7.489.000	PAD		1 buku	5.619.216	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Kab. Malang	2 buku	7.009.000	DAU		2 buku	3.648.537	

1	Kode	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
		Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	100%	150.000.000	DBHCHT		100%	150.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	2 laporan	150.000.000	DBHCHT		2 laporan	150.000.000	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	Kab. Malang	25 %	1.018.542.000	PAD		25 %	1.768.832.445	
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 laporan	380.968.000	PAD		2 laporan	673.663.749	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 laporan	380.980.000	PAD		2 laporan	683.683.936	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 laporan	256.594.000	PAD		2 laporan	411.484.760	
JUMLAH					1.473.224.000			JUMLAH	2.270.966.173	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menyiapkan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun langsung usulan Program / Kegiatan Masyarakat, dan lebih sebagai *suporting staff* di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SETDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 2 (dua) meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelayanan Administrasi Perekonomian.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Prgram peningkatan disiplin aparatur.
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.
6. Program Administrasi Bidang Perekonomian.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
20. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai;
21. Monitoring dan Evaluasi sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro;
22. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
23. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	160.268.200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	257.392.614	Jumlah Anggaran Mengalami penurunan
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	120 surat	5.800.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	120 surat	1.054.152	-
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	72 OB	39.739.000	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	72 OB	65.604.000	Digunakan untuk honorarium PPTK
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	4.531.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	5.830.000	Jumlah anggaran mengalami penurunan disesuaikan dengan kebutuhan
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	60 Jenis	14.401.000	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	60 Jenis	26.152.486	-
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 Jenis	2.774.000	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	3.221.020	-
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 Jenis	1.782.000	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 jenis	3.235.661	-
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 Jenis	1.741.000	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	3.162.456	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8. Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kab. Malang	Jumlah bahan Logistic kantor yang dibeli	243 HOK	4.400.000	8. Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Kab. Malang	Jumlah bahan logistic yang dibeli	243 HOK	4.480.000	-
	9. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	192 HOK	3.882.000	9. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	192 HOK	5.234.158	-
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	200 HOK	48.884.000	0. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	200 hok	58.717.731	-
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	200 HOK	32.334.000	1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	200 hok	80.700.950	Jumlah anggaran disesuaikan acuan realisasi th 2016
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	36.727.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	35.445.861	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pemeliharaan barang
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 Jenis	15.209.000	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	0	0	-
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	2.790.000	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	5.065.786	-
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Jenis	3.741.000	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	3.162.456	-
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 Unit	10.803.000	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 unit	19.618.940	Terjadi pengurangan kendaraan R2

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Jenis	4.184.000	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	7.598.679	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	11.723.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	14.400.000	Kegiatan diajukan guna memenuhi kebutuhan pakaian pegawai
	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	5.815.000	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	9.600.000	Pengadaan seragam putih hitam
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	16 setel	5.908.000	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	16 setel	4.800.000	Pengadaan seragam olah raga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	85.866.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	44.895.253	Untuk mengikuti peningkatan kapasitas pegawai
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16 orang	85.866.000	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	16 orang	44.895.253	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	14.498.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	-	Untuk lembur penyusunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 Buku	7.489.000	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	Untuk lembur penyusunan prognosa keuangan
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	1. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2 buku	7.009.000	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	2. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	-	-	Untuk lembur penyusunan CALK dan LKj
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100%	150.000.000	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100%	150.000.000	Sesuai Permenkeu no.28 th.2016
	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Kab. Malang	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100%	1.018.542.000	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Kab. Malang	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100 %	1.768.832.445	Sesuaian nomenkelatur program/kegiatan sesuai revieu Renstra
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 laporan	380.968.000	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 laporan	673.663.749	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	380.980.000	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	683.683.936	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	256.594.000	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	411.484.760		
JUMLAH					1.477.624.000	JUMLAH					2.270.966.173	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA
KABUPATEN MALANG

Rancangan Rencana kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang di tahun 2020 melaksanakan 5 Program dengan 23 kegiatan. Adapun Pendanaan Program dan kegiatan tersebut bersumber dari PAD dan 1 Program yang di ambil dana dari DBHCHT. Program/ Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dan sumber dananya dapat dijelaskan pada tabel Berikut:

Tabel 3.2

Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020
Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				SUMBER DANA			
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF					
2	3	4	5	6	7				
				2.270.966.173,00					
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.270.966.173,00					
FUNGSI LAINNYA				2.270.966.173,00					
BAGIAN PEREKONOMIAN				2.270.966.173,00					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	257.392.614,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kab. Malang	120 buah	1.054.152,00	APBD Kabupaten				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	72 Ob	65.604.000,00	APBD Kabupaten				
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kab. Malang	12 OB	5.830.000,00	APBD Kabupaten				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	60 Jenis	26.152.486,00	APBD Kabupaten				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3.221.020,00	APBD Kabupaten				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	Kab. Malang	6 Jenis	3.235.661,00	APBD Kabupaten				

		(Jenis)						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kab. malang	2 Jenis	3.162.456,00	APBD Kabupaten		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kab. Malang	192 HOK	5.234.158,00	APBD Kabupaten		
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kab. Malang	200 HOK	58.717.731,00	APBD Kabupaten		
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	200 HOK	80.700.950,00	APBD Kabupaten		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	234 Jenis	4.480.000,00	APBD Kabupaten		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	35.445.861,00			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kab. Malang	6 Unit	19.618.940,00	APBD Kabupaten		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	3.162.456,00	APBD Kabupaten		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	5.065.786,00	APBD Kabupaten		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	7.598.679,00	APBD Kabupaten		

	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	14.400.000,00			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kab. Malang	16 Stel	9.600.000,00	APBD Kabupaten		
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kab. Malang	16 Stel	4.800.000,00	APBD Kabupaten		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	44.895.253,00			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Malang	16 Orang	44.895.253,00	APBD Kabupaten		
	PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian		25%	1.768.832.445,00			
	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 Laporan	673.663.749,00	APBD Kabupaten		
	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 Laporan	683.683.936,00	APBD Kabupaten		
	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 Laporan	411.484.760,00	APBD Kabupaten		
	MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT		100%	150.000.000,00			
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	Bagian Perekonomian	2 Laporan	150.000.000,00	DBHCHT		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2020 Rancangan Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 23 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI